

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Tujuan dasar dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dikatakan berhasil jika dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan yang di laksanakan harus mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, sehingga tercapainya kesejahteraan. Maka dari itu pembangunan sumber energi dalam menopang kebutuhan sangat di perlukan (Purwanto, 2013).

Pengadaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya sebagai penghubung antara daerah, bendungan sebagai pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Pembangunan ini Semakin banyak terlihat di negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ini tentu membutuhkan lahan yang luas sehingga di perlukannya pembebasan lahan. Di sisi lain pembebasan lahan telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat lokal (ADB, 2006).

Dalam pembebasan lahan tentu ada peralihan lahan pribadi ke pemerintah. Pemukim penduduk yang dipindahkan karena adanya pembebasan lahan tentu akan menghadapi banyak penyesuaian di tempat tinggal yang baru. Maka dari itu penduduk harus memulai kehidupan dengan menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan sosial dan sistem administrasi yang baru, baik secara spontan maupun terencana (Woube, 2005). Cernea (2007) membagi beberapa risiko pemiskinan dalam *involuntary resettlement*, antara lain tidak memiliki lahan, pengangguran, tunawisma, marjinalisasi, peningkatan morbiditas dan mortalitas, kerawanan pangan, kehilangan akses ke properti bersama, disartikulasi sosial dan dampak yang berbeda (Cernea, 2007) .

Michael M. Cernea (2007) secara ringkas menjelaskan dalam model teoretis tentang proses pemindahan atau *resettlement* yang dikarenakan adanya pembangunan. Model Risiko dan Rekonstruksi Pemiskinan (IRR). Model ini merupakan alat konseptual dan metodologis yang tepat untuk melakukan berbagai fungsi penting dalam mendukung pengadaan pengembangan analitis dan operasional. Instrumen IRR mengarahkan agar perencana proyek untuk fokus pertama kali pada masalah kemiskinan yang merupakan inti dari *Involuntary Resettlement*. Dalam mempersiapkan proyek-proyek yang memerlukan *resettlement*. Sebaiknya, meningkatkan efektivitas dengan memindahkan penemuan risiko ke hulu dalam persiapan proyek, dan dengan

membantu mengurangi dampak perpindahan yang berisiko, memandu tindakan penghapusan risiko atau pengurangan risiko sedini mungkin (Cernea, 2007).

Fungsi utama yang dapat digunakan dalam model Risiko dan Rekonstruksi Pemiskinan (IRR) adalah:

- a. fungsi prediktif, untuk mengantisipasi risiko pemiskinan yang terkait dengan *Involuntary Resettlement* dan *voluntary resettlement*
- b. fungsi diagnostik, untuk membantu penilaian di lapangan dan intensitas setiap risiko, dalam konteks proyek tertentu
- c. fungsi perencanaan dan penyelesaian masalah, untuk mengarahkan tindakan kontra-risiko dan penggabungannya dalam *resettlement* perencanaan, baik untuk mencegah atau mengurangi risiko dan fungsi penelitian, sebagai metodologi dalam analisis ilmiah tentang dampak pemukiman kembali dan untuk memandu pemantauan dan studi evaluasi tentang proses pemukiman kembali.

Upaya yang dilakukan dalam meminimal risiko dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang direlokasi atau terkena dampak dari *Involuntary resettlement* dengan memberikan kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu penyebab meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang direlokasi. Kompensasi bisa diberikan berupa pemberian uang maupun lahan (Cernea, 2007). Dengan adanya kompensasi masyarakat dapat melakukan aktivitas perekonomian kembali yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangganya.

Kompensasi bukan hanya harus ada tetapi juga harus mencukupi dan tepat waktu, karena ini sangat urgen untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang terkena dampak *involuntary resettlement* (World Bank, 2000). Ketepatan waktu dalam pemberian kompensasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada program *involuntary resettlement*. Sehingga pemindahan masyarakat ke lokasi baru menyebabkan kemunduran besar bagi kehidupan rumah tangga, Sedangkan rumah tangga perlu modal dan upaya dalam mengejar pemulihan kembali. Rumah tangga yang dipindahkan harus berusaha keras dalam mengembalikan hidup mereka minimal ke posisi sebelum adanya proyek, mereka harus memperbaiki waktu yang hilang, dengan memacu laju pembangunan. Rumah tangga tidak hanya kehilangan aset, akan tetapi mereka juga harus memacu perbaikan penghidupan supaya bisa sama dengan masyarakat sekitar yang tidak terkena dampak pembangunan. Dengan di berikannya bantuan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga (Kamarni & Saputra, 2021)

Inklusi keuangan juga sangat diperlukan selain kompensasi dalam mendorong perbaikan kesejahteraan. Lembaga bank dan bukan bank berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengelola keuangan. Maka dari itu pemerintah pusat telah membuat kebijakan tentang inklusi keuangan di mana sasaran utama dari kebijakan pemerintah adalah kelompok migran dan penduduk daerah terpencil yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu serta kurungan akses dalam keuangan. Dengan adanya inklusi keuangan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta dapat terhubung dengan lembaga keuangan baik bank atau lembaga non bank (Sethi & Acharya, 2018).

Perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin dengan inklusi keuangan dapat mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan. Dengan adanya Akses perbankan bagi masyarakat dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal, mempercepat pertumbuhan agregat, dan dapat mengurangi hambatan dalam akses kredit produktif (Fombang & Adjasi, 2018), dengan adanya akses ke lembaga keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan (Yanti, 2019).

Salah satu bendungan di Indonesia, Bendungan Koto Panjang seluas 124 km² yang berdampak pada desa di Provinsi Riau dan dua desa di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah pengungsi adalah 4886 rumah tangga dengan 16.954 orang (JBIC, 2004). Untuk lebih jelasnya pembagian desa yang berdampak terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Desa Lama dan Lokasi Baru *Involuntary Resettlement* Koto Panjang

No.	Nama Desa Lama	Nama Desa Baru	Jumlah KK	Provinsi
1	Muaro Mahat	Muaro Mahat Baru	447	
2	Pulau Gadang	Pulau Gadang	592	
3	Tanjung Alai	Tanjung Alai	313	
	Batu Bersurat			
4	Batu Bersurat Pasar	Kelurahan Batu	700	
	Batu Bersurat Sebarang	Bersurat	557	Riau
5	Pongkai	Pongkai Istiqomah	259	
		Mayang Pongkai	200	
6	Koto Tuo	Koto Tuo	599	
		Koto Tuo Barat		
7	Muara Takus	Muara Takus	244	
8	Gunaung Bungsu	Gunaung Bungsu	241	
9	Tanjung Baliak	Tanjung Baliak	421	Sumatera
10	Tanjung Pauah	Tanjung Pauah	313	Barat

Dari tabel terlihat bahwa ada 3 pola pemindahan yaitu, pertama desa lama yang pindah ke desa baru tanpa ada perubahan penduduk, kedua desa lama yang bergabung setelah di desa baru, dan ketiga desa mengalami pemekaran jadi beberapa desa Ketika di pindahkan ke desa baru. Yang hanya mengalami pemindah dan berganti nama antara lain Desa yang Muaro lahat, pulau gadang, tanjung alai, muara takus, gunaung bungus, dan tanjong pauah. Sedangkan desa yang menjadi satu setelah di desa baru yaitu Batu bersurat, Batu bersurat pasar dan Batu bersurat sebarang menjadi Kelurahan Batu Bersurat. Desa yang mengalami pemekaran yaitu desa Pongkai yang mekar menjadi tiga desa, Pongkai istiqomah, dan Mayang pongkai. Koto tuo juga mengalami pemekaran yaitu Koto tuo dan Koto Tuo barat.

Penelitian yang dilakukan Karimi (Karimi et al., 2005) menunjukkan bahwa adanya perubahan kondisi perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan Koto Panjang pasca relokasi, meskipun sebagian masyarakatnya masih ada dalam kondisi belum sejahtera pasca relokasi, kondisi ini dilihat berdasarkan pendapatan rumah tangganya. Namun perubahan akan terus terjadi dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Semua rumah tangga yang terkena dampak karena pembangunan bendungan mendapatkan kompensasi berupa bangunan dan lahan dalam ukuran yang sama (Andrianus et al., 2018). Walaupun sudah menerima kompensasi yang sama, dalam bentuk bangunan maupun lahan yang sama, namun sebagian rumah tangga kehidupannya ada yang lebih baik dan ada sebagian lebih buruk setelah direlokasi (Andrianus et al., 2019).

Penelitian ini mengambil sampel dua desa di Koto panjang yang memiliki pemilihan pola kompensasi yang berbeda, yaitu desa Koto Mesjid dan desa Pongkai Istiqomah. Desa Koto Mesjid memilih kompensasi dengan Pola Bedol Desa, dalam pola ini masyarakat mendapat rumah, kompensasi uang, dan tanah. Lahan tersebut dibagi menjadi 2 Ha untuk perkebunan kelapa sawit dan ½ Ha untuk perumahan. Sedangkan desa Pongkai istiqomah memilih Pola bebas, Maka dari itu masyarakat hanya mendapat kompensasi uang dan diberi kebebasan memilih permukiman baru di mana saja. Masyarakat Pongkai Istiqomah memilih tinggal sekitar tempat tinggal mereka yang lama.

Maka dari itu penelitian ini mencoba melihat tingkat kesejahteraan dari kedua desa yang memiliki pola pemberian kompensasi dan inklusi keuangan yang berbeda. Untuk itu makan dalam

penelitian ini perlu dilihat bagaimana pengaruh kompensasi dan inklusi keuangan terhadap kesejahteraan di desa Pongkai Istiqomah dan Koto Masjid akibat program *involuntary resettlement*, dan bagaimana kompensasi mempengaruhi inklusi keuangan di Pongkai Istiqomah dan Koto Masjid akibat program *involuntary resettlement*.

B. Rumusan Masalah

Dengan rumusan di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kompensasi dan inklusi keuangan terhadap kesejahteraan rumah tangga desa Pongkai Istiqomah dan Koto Masjid akibat program *involuntary resettlement*?
- b. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap inklusi keuangan rumah tangga desa Pongkai Istiqomah dan Koto Masjid yang dipindahkan akibat program *involuntary resettlement*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh kompensasi dan Inklusi keuangan terhadap kesejahteraan rumah tangga di desa Pongkai Istiqomah dan Koto Masjid
- b. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap inklusi keuangan desa Pongkai Istiqomah dan Koto Masjid yang dipindahkan akibat program *involuntary resettlement*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan dapat memberikan ide bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan pedoman perencanaan dan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan dan rumah tangga yang dipindahkan akibat program *involuntary resettlement*.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemangku kepentingan yakni universitas, dan penelitian dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi dalam upaya pembangunan atau program *Involuntary resettlement* selanjutnya dalam mewujudkan kesejahteraan yang cepat.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN LITERATUR

Berisi tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan *involuntary resettlement*, kompensasi dan inklusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu ponkai istiqomah dan koto mesjid

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian kondisi kesejahteraan di ponkai istiqomah dan koto mesjid, Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dalam rangka pengambilan keputusan dalam *involuntary resettlement*.